

Angger-angger Sultan Agungan

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20187196&lokasi=lokal>

Abstrak

Teks yang berjudul Angger-angger Sultan Agungan, atau juga Angger-angger Tatakrama ini, menguraikan berbagai aturan atau tatakrama yang bersifat protokoler, terutama dalam sikap dan tindak-tanduk, serta dalam penggunaan bahasa (basa bagongari) dalam pergaulan di lingkungan Kraton Surakarta. Di dalam tatakrama berbahasa dicakup berbagai istilah bahasa yang dipergunakan oleh abdidalem atau pejabat-pejabat di lingkungan kraton dalam berdialog, atau bila sedang menghadap raja sesuai dengan jabatan, kedudukan, dan kepangkatan masing-masing. Di samping itu diuraikan juga mengenai fungsi, peranan, dan kedudukan para pejabat pemerintah berkenaan dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Dibandingkan dengan MSB/H.1 1 yang berjudul Angger-angger Tatakrama, teks naskah ini kurang lengkap. Bahkan dapat dikatakan merupakan bagian kecil dari isi yang tercakup di dalam naskah MSB/H.1 1 tersebut, yang merupakan kumpulan dari undang-undang tatakrama yang berlaku di lingkungan Kraton Surakarta. Adapun rincian isi teks naskah ini sebagai berikut: 1. Serat Pranatan Wawaton Angger-angger Tatakrama (h.1-26), menguraikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan kraton dalam hal berkomunikasi antara abdidalem dengan para pejabat lingkungan kraton, maupun antara pejabat dengan rajanya sendiri. Aturan-aturan itu meliputi aturan berbahasa, bersikap, dan bertingkah laku; 2. Serat Wadu Aji (28-36), menguraikan nama-nama jabatan ketentaraan (wadya bala) dalam fungsi dan peranannya, yang diambil dari Serat Raja Kapakapa; 3. Pasebutan Namaning Priyagung (37-39), menguraikan istilah nama-nama pejabat kraton dari tingkat ratu sampai ke jajar dengan penjelasan makna yang terkandung dalam istilah-istilah itu; 4. Ukaraning Tembung Para Abdidalem (40-44), menguraikan aturan-aturan yang berlaku bagi para abdidalem dalam hal bertutur kata dengan atasannya; 5. Serat Paramengsesa (h.46-59), menguraikan aturan-aturan basa kadhaton, terutama bahasa yang dipergunakan dalam percakapan antara patih dengan rajanya; 6. Tembung Sumiwi (60-67), menguraikan ungkapan atau pepindhan yang berlaku dalam bahasa kedhatonan tersebut. Pigeaud membeli naskah ini dari R. Tanaya di Surakarta pada bulan Juni 1934. Surat penawaran Tanaya kepada Pigeaud tersisip di dalam naskahnya. Mandrasastra telah membuat ringkasan isi naskah (terlampir) pada tahun berikutnya.